



# Legitimasi Kepemimpinan Perempuan di Ruang Politik: Studi Kasus Kepemimpinan Sherly Tjoanda Sebagai Gubernur Maluku Utara

**Mugi Rizkia Rizal**

Internasional Women University, Indonesia

Email : [Rizkiamugi@gmail.com](mailto:Rizkiamugi@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini membahas legitimasi kepemimpinan perempuan di ruang politik melalui studi kasus Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan Sherly Tjoanda serta melihat bagaimana legitimasi kepemimpinannya terbentuk sebagai perempuan di tengah lingkungan politik yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima masyarakat Maluku Utara serta studi literatur yang meliputi dokumen resmi, artikel jurnal, buku, dan pemberitaan yang relevan. Analisis penelitian menggunakan konsep *Interactive Leadership* Judy B. Rosener (1990) yang menekankan komunikasi, partisipasi, kerja sama, dan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap Sherly Tjoanda tidak semata-mata ditentukan oleh identitasnya sebagai perempuan, tetapi juga berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan, pengalaman, komunikasi, dan tanggung jawab kepemimpinannya. Legitimasi Sherly terbentuk melalui mandat elektoral sekaligus diperkuat oleh penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, kasus Sherly Tjoanda menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang memperoleh legitimasi politik ketika mampu memperoleh dukungan, membangun kepercayaan, dan menjalankan kepemimpinan yang dapat diterima oleh masyarakat.

**Kata kunci:** legitimasi politik, kepemimpinan perempuan, *interactive leadership*, Sherly Tjoanda, Maluku Utara.

## PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender, keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam merancang kebijakan serta memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan perempuan dapat terwakili secara adil dalam setiap keputusan politik (Maulidia, 2024).

Keterlibatan perempuan di ruang politik tidak hanya soal keadilan dan kesetaraan gender, melainkan indikator bagi kualitas demokrasi di Indonesia (Alkhatiri, 2025). Dalam ruang politik, perempuan perlu dilibatkan secara aktif dalam keputusan dan penyusunan

kebijakan. Perempuan memiliki hak suara dan hak politik yang setara dengan laki-laki (Prismakartini, 2025).

Indonesia telah memberikan ruang bagi perempuan dalam dunia politik, tercatat dalam ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa “pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan”. Meskipun demikian, dalam kenyataannya keterlibatan perempuan dalam politik sebagai anggota legislatif belum sepenuhnya berjalan dengan baik (Kiftiyah, 2021).

Meskipun kebijakan kuota perempuan telah diterapkan, keterwakilan perempuan di ranah politik Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Berdasarkan riset dari Laboratorium Indonesia mengenai keterwakilan perempuan dalam Pilkada 2024, keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif, bahwa dari 37 provinsi yang telah melaksanakan pilkada tahun 2024, tercatat hanya 43% provinsi yang memiliki calon gubernur/wakil gubernur perempuan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota sebanyak 94% Provinsi yang memiliki calon perempuan untuk posisi bupati/wakil bupati, serta 69% untuk jabatan walikota/wakil wali kota (Reine Prihandoko, 2025).

Data menunjukkan pada pemilu 2019, representatif perempuan dalam lembaga legislatif dalam hal ini di DPR hanya mencapai sekitar 20,5% dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 21,9% Meskipun ada peningkatan, angka ini masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kuota 30% belum sepenuhnya benar-benar berhasil mencapai tujuan utamanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang bagi perempuan untuk dapat memperoleh posisi dalam politik masih menghadapi tantangan, baik yang sifatnya kultural maupun struktural (Alkhatiri, 2025).

Implementasi kuota perempuan juga seringkali menghadapi gangguan teknis. Perempuan hanya dijadikan alat oleh partai politik hanya untuk memenuhi persyaratan administratif saja, tanpa memberikan dukungan yang signifikan bagi kandidat perempuan untuk memenangkan pemilu baik dari segi pelatihan politik maupun dari segi pembiayaan kampanye (Tsabita, 2024). Indonesia negara yang masih menganut sistem nilai patriarki, kesempatan bagi perempuan untuk menjadi politisi relatif lebih terbatas karena adanya persepsi masyarakat terkait pembagian antara perempuan dan laki-laki yang berujung pada bias ke arah membatasi gerak dan peran perempuan hanya pada urusan rumah tangga saja (Putri, n.d.).

Selain harus menghadapi hambatan kultural dan struktural, perempuan yang terlibat langsung dalam politik juga menghadapi tantangan dalam memperoleh legitimasi sebagai pemimpin. Dalam sistem politik negara, legitimasi berfungsi sebagai fondasi penting bagi keberlangsungan suatu kepemimpinan. Legitimasi tidak hanya digunakan untuk menunjukkan sah atau tidaknya kekuasaan secara formal, tetapi dapat mencerminkan tingkat penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kepemimpinan yang dijalankan. Seorang pemimpin yang memiliki legitimasi yang tinggi akan memperoleh kepercayaan dan dukungan dari warga untuk melaksanakan kebijakan. Di sisi lain, jika pemimpin beroperasi tanpa legitimasi, kekuasaannya akan menjadi lemah dan rentan terhadap gejolak politik maupun sosial (Alkhatiri, 2025). Legitimasi merupakan dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap sistem politik, atau terhadap pemerintah yang berwenang. Pemerintah dapat berjalan dengan maksimal apabila mendapatkan banyak dukungan, seperti pengakuan dan penerimaan dari masyarakat (Nailufar, 2022).

Legitimasi bagi pemimpin perempuan tidak hanya bergantung pada keberhasilan politik maupun kemampuan kepemimpinannya, tetapi juga dipengaruhi oleh stereotip gender dan konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat. Di Indonesia, dukungan terhadap perempuan sebagai pemimpin masih mengalami berbagai tantangan yang disebabkan oleh budaya patriarki kuat dan memposisikan laki-laki sebagai figur yang lebih pantas untuk memimpin (Oktaviani, 2023). Akibatnya, perempuan seringkali harus membuktikan kompetensi dan kinerja yang lebih tinggi agar dapat mencapai tingkat penerimaan dan kepercayaan publik yang setara dengan para pemimpin laki-laki.

Berdasarkan kondisi tersebut, perempuan yang telah berhasil menduduki jabatannya di politik tidak hanya dituntut untuk mampu memenangkan kontestasi politik, melainkan harus memperoleh legitimasi dari masyarakat agar kepemimpinannya dapat diterima dan dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana legitimasi tersebut dibangun oleh seorang pemimpin perempuan di tengah budaya Indonesia yang masih menjunjung budaya patriarki.

Kemunculan Sherly Tjoanda dalam kancah politik Indonesia menjadi fenomena yang cukup menarik sorotan publik sekaligus memunculkan berbagai perdebatan terkait posisi perempuan dalam kepemimpinan politik. Nama Sherly Tjoanda setelah ia terpilih menjadi Gubernur Maluku Utara muncul sebagai fenomena sekaligus paradoks. Terpilihnya Sherly sebagai Gubernur Maluku Utara banyak pihak yang menyebutnya sebagai simbol

keberhasilan seorang perempuan berlatar belakang etnis Tionghoa yang berhasil mendobrak dominasi kepemimpinan laki-laki muslim di wilayah Indonesia timur (N, 2025).

Penelitian kepemimpinan perempuan di ranah politik telah banyak diteliti oleh berbagai penelitian terdahulu. Penelitian Oleh (Taufiqah et al, 2026) mengkaji kepemimpinan perempuan di ranah politik lokal melalui analisis kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dengan menggunakan perspektif kepemimpinan transformasional. sementara itu, penelitian (Bella et al, 2026) mengkaji Kepemimpinan perempuan di Indonesia masih sangat mengalami hambatan patriarki dan struktural yang sangat kuat. Namun sherly Tjoanda mampu menavigasi ruang patriarki melalui aksi nyatanya yang memperkuat legitimasi publiknya. Penelitian (Aulia D. F., 2026) mengkaji terkait framing gender dalam politik lokal. Terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji khususnya dalam melihat representatif kepemimpinan perempuan di ruang media digital. Penelitian ini mengkaji bagaimana isu dan konstruksi gender muncul dalam pemberitaan dan komunikasi politik di ruang publik.

Secara politis dan akademis, terpilihnya Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda pada pemilihan umum tahun 2024 terjadi di tengah politik lokal Maluku Utara yang masih didominasi oleh laki-laki. Dimana dinamika kekuasaan, ikatan kekerabatan dan konvensi sosial dapat memengaruhi cara masyarakat memandang dan mengevaluasi seorang pemimpin. Kehadiran Sherly Tjoanda menjadi lahan yang subur untuk mempelajari bagaimana norma gender dapat dipertahankan (Aulia, 2026) . Hal ini menarik perhatian bagi peneliti terkait bagaimana Sherly Tjoanda mendapatkan legitimasi masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin di Maluku Utara mengingat dirinya adalah seorang perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi kasus untuk menganalisis bagaimana legitimasi kepemimpinan perempuan yang direpresentasikan oleh Sherly Tjoanda sebagai gubernur di Maluku Utara. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur yang mencakup dokumen resmi penyelenggara pemilu, dokumen putusan Mahkamah Konstitusi, artikel jurnal, buku, serta pemberitaan yang relevan dengan kepemimpinan Sherly Tjoanda. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi,

mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi berdasarkan dua fokus pembahasan, yaitu penerimaan masyarakat dan pembentukan legitimasi kepemimpinan Sherly Tjoanda. Selanjutnya, temuan penelitian dianalisis menggunakan konsep *interactive leadership* Judy B. Rosener untuk melihat bagaimana komunikasi, partisipasi, dan hubungan dengan masyarakat dapat dikaitkan dengan proses penguatan legitimasi kepemimpinan perempuan.

## KERANGKA TEORITIS

Untuk memahami fenomena kepemimpinan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *Interactive Leadership* yang dikemukakan oleh Judy B. Rosener (1990) yang menjelaskan bahwa terdapat adanya perbedaan antara kecenderungan gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial serta konstruksi gender yang berkembang dalam masyarakat.

Kepemimpinan Sherly Tjoanda sebagai perempuan di ruang politik menghadapi tantangan, ia berada dalam kondisi triple minority, yakni sebagai pemimpin perempuan non-muslim dan bagian dari etnis Tionghoa di Maluku Utara yang awalnya kepemimpinan sangat didominasi oleh laki-laki dan beragama islam. Hal ini menjadikan Sherly tidak hanya menghadapi tantangan sebagai perempuan dalam politik, tetapi juga berhadapan dengan identitas sosial lain yang turut mempengaruhi penerimaan terhadap dirinya.

(Rosener, 1990) melihat bahwa kepemimpinan perempuan memiliki kecenderungan *interactive leadership* yang menekankan komunikasi, kerjasama, keterlibatan dengan pihak lain. Konsep inilah yang kemudian digunakan untuk melihat bagaimana Sherly menjalankan kepemimpinannya dan memperoleh kepercayaan di tengah lingkungan politik yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan lima orang informan yang merupakan masyarakat Provinsi Maluku Utara. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh pandangan masyarakat mengenai penerimaan terhadap kepemimpinan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara. Informan berasal dari beberapa wilayah kabupaten/kota di Maluku Utara dengan latar

belakang usia, jenis kelamin, dan pekerjaan yang berbeda. Keragaman tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam konteks politik lokal Maluku Utara.

**Tabel 1. Karakteristik Informan**

| Kode | Usia     | Jenis Kelaman | Pekerjaan        |
|------|----------|---------------|------------------|
| I1   | 20 Tahun | Perempuan     | Mahasiswa        |
| I2   | 23 Tahun | Perempuan     | Mahasiswa        |
| I3   | 17 Tahun | Laki-laki     | Pelajar          |
| I4   | 22 Tahun | Laki-laki     | Buruh Swasta     |
| I5   | 30 Tahun | Perempuan     | Ibu Rumah Tangga |

Sherly Tjoanda merupakan perempuan keturunan Tionghoa yang lahir di Ambon pada 12 Agustus 1982. Ia menempuh pendidikan di Universitas Kristen Petra Surabaya program studi *International Business Management*. Kemudian melanjutkan pendidikan melalui program, *double degree* di Inholland University, Belanda (Rahmania, 2026) . Di samping menjalankan perannya sebagai seorang ibu dari tiga anak, Sherly memiliki pengalaman di dunia bisnis sebagai Direktur PT Bela Group yang dikelola bersama mendiang suaminya, Benny Laos. Sherly juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, salah satunya melalui Yayasan Bela Peduli sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan (Shafa, 2025)

Keterlibatan Sherly dalam kehidupan politik semakin berkembang ketika Benny Laos menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai. Pada periode 2017-2022, Sherly menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulau Morotai. Selain itu, ia aktif dalam sejumlah organisasi, seperti Pengurus Perwosi Pusat periode 2018-2022, Bunda PAUD Kabupaten Pulau Morotai periode 2017-2022, Pembina Yayasan Bela Peduli, serta ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Maluku Utara periode 2022-2027 (Shafa, 2025) . Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 15 Oktober 2024, Sherly Tjoanda tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp709.760.235.594. Jumlah tersebut menempatkannya sebagai gubernur dengan kekayaan tertinggi di Indonesia untuk periode 2025-2030 (News, 2025).

### **1.1. Penerimaan Masyarakat terhadap Kepemimpinan Perempuan di Maluku Utara**

Hasil wawancara dengan lima orang informan menunjukkan adanya pandangan yang cenderung positif terhadap kepemimpinan Sherly Tjoanda sebagai perempuan di ruang politik Maluku Utara yang memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan politik.

Berdasarkan informan pertama, ia memandang bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi pemimpin selama memiliki kemampuan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak menjadi pertimbangan utama dalam menilai kelayakan seorang pemimpin.

Hal serupa disampaikan oleh Informan kedua, perempuan berusia 23 tahun yang menilai bahwa penerimaan terhadap Sherly lebih berkaitan dengan kemampuan dan cara dirinya menjalankan peran sebagai pemimpin dibandingkan dengan identitasnya sebagai perempuan. Sementara itu, Informan ketiga, seorang laki-laki berusia 17 tahun menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan dapat diterima selama pemimpin tersebut mampu menjalankan tugas dan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat.

Pandangan yang berbeda terlihat dari Informan keempat, laki-laki berusia 22 tahun yang menurutnya, pengalaman Sherly dalam kegiatan sosial dan kedekatannya dengan masyarakat menjadi salah satu hal yang dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap dirinya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Informan kelima, perempuan berusia 30 yang menilai bahwa kemampuan seorang pemimpin untuk berkomunikasi dan memahami kebutuhan masyarakat turut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin tersebut.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan masyarakat terhadap Sherly Tjoanda tidak semata-mata ditentukan oleh identitasnya sebagai perempuan. Informan lebih banyak menekankan aspek kemampuan, tanggung jawab, pengalaman, komunikasi, dan hubungan dengan masyarakat sebagai bagian dari penilaian terhadap seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang untuk memperoleh penerimaan dalam kepemimpinan politik ketika dipandang memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinan.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *Interactive Leadership* yang dikemukakan oleh Judy B. Rosener (1990). Rosener menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan gaya kepemimpinan perempuan yang menekankan komunikasi, partisipasi, kerja sama, serta

pembangunan hubungan dengan pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, pandangan para informan mengenai pentingnya komunikasi, pengalaman, dan hubungan dengan masyarakat dapat digunakan untuk memahami bagaimana penerimaan terhadap Sherly Tjoanda sebagai pemimpin perempuan terbentuk.

## **1.2. Legitimasi Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Perempuan di Maluku Utara**

Legitimasi kepemimpinan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara tidak hanya dapat dilihat dari keberhasilannya memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada 2024, tetapi juga dari adanya penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sebagai pemimpin. Secara formal, kemenangan Sherly Tjoanda bersama Sarbin Sehe dengan perolehan 359.416 suara dari 695.492 suara sah memberikan dasar bagi dirinya untuk menjalankan jabatan sebagai Gubernur Maluku Utara. Namun, legitimasi sebagai pemimpin tidak berhenti pada mandat elektoral, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengakui dan menerima kapasitas seorang pemimpin.

Berdasarkan hasil wawancara, Informan pertama memandang bahwa Sherly memiliki legitimasi sebagai gubernur karena telah memperoleh mandat melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurutnya, terpilihnya Sherly menunjukkan bahwa masyarakat memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin Maluku Utara. Sementara itu, Informan kedua menilai bahwa legitimasi seorang pemimpin juga perlu dilihat dari kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab setelah memperoleh jabatan. Dengan demikian, kemenangan dalam pemilihan menjadi awal dari legitimasi, sedangkan pelaksanaan kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mempertahankan kepercayaan tersebut.

Pandangan serupa juga terlihat dari Informan ketiga yang menilai bahwa seorang pemimpin dapat dikatakan memiliki legitimasi ketika mampu menjalankan tugasnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Brgitupun informan keempat juga mengaitkan legitimasi Sherly dengan penerimaan masyarakat terhadap dirinya. Menurutnya, masyarakat yang telah memberikan suara kepada Sherly menunjukkan adanya kepercayaan yang menjadi dasar bagi dirinya untuk menjalankan kepemimpinan. Sementara itu, Informan kelima menekankan pentingnya hubungan antara pemimpin dengan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan masyarakat perlu dipertahankan melalui komunikasi dan keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa legitimasi Sherly Tjoanda dapat dipahami melalui dua aspek, yaitu legitimasi yang diperoleh melalui proses elektoral dan legitimasi yang berkaitan dengan penerimaan serta kepercayaan masyarakat. Kemenangan dalam Pilkada memberikan legitimasi formal kepada Sherly sebagai gubernur, sedangkan penerimaan masyarakat menjadi bagian dari legitimasi sosial yang perlu terus diperkuat selama dirinya menjalankan kepemimpinan.

Temuan tersebut dapat dianalisis melalui konsep *Interactive Leadership* Judy B. Rosener (1990), yang menekankan pentingnya komunikasi, partisipasi, kerja sama, dan hubungan antara pemimpin dengan pihak lain. Dalam konteks kepemimpinan Sherly Tjoanda, legitimasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh jabatan, tetapi juga dengan bagaimana kepercayaan tersebut dipertahankan melalui hubungan dengan masyarakat. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan perempuan merupakan proses yang berkelanjutan, di mana mandat politik perlu diikuti dengan kemampuan membangun kepercayaan dan memperoleh pengakuan masyarakat dalam menjalankan kepemimpinan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2024 menunjukkan adanya ruang bagi perempuan untuk memperoleh dukungan politik dan menduduki posisi kepemimpinan daerah. Hasil wawancara dengan masyarakat Maluku Utara menunjukkan bahwa penerimaan terhadap Sherly tidak semata-mata didasarkan pada identitas gender, tetapi juga berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan, pengalaman, tanggung jawab, komunikasi, dan hubungan dengan masyarakat. Legitimasi kepemimpinan Sherly Tjoanda dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu legitimasi formal yang diperoleh melalui proses elektoral dan legitimasi sosial yang berkaitan dengan penerimaan serta kepercayaan masyarakat. Perolehan suara dalam Pilkada menjadi dasar bagi Sherly untuk memperoleh mandat sebagai gubernur, sedangkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat legitimasi tersebut selama menjalankan kepemimpinannya.

Dalam perspektif *Interactive Leadership* Judy B. Rosener (1990), komunikasi, partisipasi, kerja sama, dan hubungan dengan masyarakat menjadi unsur yang relevan dalam memahami penerimaan terhadap kepemimpinan Sherly Tjoanda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak berhenti pada keberhasilan

memperoleh jabatan, tetapi juga membutuhkan proses membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, kasus Sherly Tjoanda menunjukkan bahwa perempuan dapat memperoleh legitimasi politik meskipun berada dalam lingkungan politik yang masih dipengaruhi oleh konstruksi gender dan budaya patriarki.

## REFERENSI

- Alkhatiri, B. (2025, Oktober 16). Kesetaraan Gender dalam Pemilu , Kunci Demokrasi yang Inklusif. pp. [https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/949\\_kesetaraan-gender-dalam-pemilu-kunci-demokrasi-yang-inklusif](https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/949_kesetaraan-gender-dalam-pemilu-kunci-demokrasi-yang-inklusif).
- Alting, M. (2024, Desember 9). *Hasil Rekapitulasi Pilgub Maluku Utara 2024, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe Raih Suara Terbanyak* . Retrieved from <https://infopublik.id/kategori/nusantara/891798/hasil-rekapitulasi-pilgub-maluku-utara-2024-sherly-tjoanda-sarbin-sehe-raih-suara-terbanyak>
- Aulia, D. F. (2026). Framing Gender dalam Politik Digital: Representasi Kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam Pemberitaan dan Platform Sosial. *Journal of Research and Development on Public Policy*, <https://journal.lppspsemarang.org/index.php/Jarvic/article/view/191/245>.
- Aulia, D. F. (2026). Framing Gender dalam Politik Digital: Representasi Kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam Pemberitaan dan Platform Sosial. *Journal of Research and Development on Public Polic*, <https://journal.lppspsemarang.org/index.php/Jarvic/article/view/191/245>.
- Bella et al, S. S. (2026). Triple Minority Dalam Ruang Patriarki Gendered Leadership Sherly Tjoanda Sebagai Gubernur Maluku Utara . *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*, <http://ejurnal.uwp.ac.id/gesi/index.php/jurnalgesi/article/view/211/125>.
- Kiftiyah, A. (2021). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Yuridis* , <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/2859/1688>.
- Maulidia, D. S. (2024). Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Politik di Indonesia. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1540/1963>.
- N, A. P. (2025, Oktober 8). *Melampaui Triple Minority: Kepemimpinan Inklusif Sherly Tjoanda*. Retrieved from Kompas.com: [https://www.kompasiana.com/anyndiaputridcn/68e48eda34777c0e567078e2/melampaui-triple-minority-kepemimpinan-inklusif-sherly-tjoanda?page=all&page\\_images=2](https://www.kompasiana.com/anyndiaputridcn/68e48eda34777c0e567078e2/melampaui-triple-minority-kepemimpinan-inklusif-sherly-tjoanda?page=all&page_images=2)
- Nailufar, N. N. (2022, Mei 15). *Legitimasi, Pengertian, Objek dan Tipenya*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/15/00300001/legitimasi--pengertian-objek-dan-tipe-tipenya>

- News, A. (2025, Februari 25). *Daftar lengkap harta kekayaan Sherly Tjoanda, gubernur terkaya*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/4671433/daftar-lengkap-harta-kekayaan-sherly-tjoanda-gubernur-terkaya>
- Oktaviani, F. H. (2023). Indonesian women leaders navigating hegemonic femininity: A Gramscian lens. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gwao.13084>.
- Prismakartini. (2025, Desember 31). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Formalitas Hukum dan Hambatan Kultural*. Retrieved from <https://prisma.surabaya.go.id/keterwakilan-perempuan-dalam-politik-formalitas-hukum-dan-hambatan-kultural/>
- Putri, N. (n.d.). *Tantangan Perempuan dalam Arus Politik Perempuan Indonesia*. Retrieved from <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>
- Rahmania, S. (2026, Juni 4). *Sherly Tjoanda: Representasi Kepemimpinan Perempuan untuk Kemajuan Maluku Utara*. Retrieved from <https://www.indonesiana.id/read/195462/sherly-tjoanda-representasi-kepemimpinan-perempuan-untuk-kemajuan-maluku-utara>
- Reine Prihandoko, S. N. (2025, Februari 2025). *Perempuan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah 2024*. Retrieved from Laboratorium Indonesia 2045: <https://www.lab45.id/detail/294/perempuan-pemenang-pemilihan-kepala-daerah-2024>
- Shafa, S. A. (2025). Membangun Citra, Mencuri Perhatian: Strategi Branding Politik Sherly Tjoanda di TikTok. *Jurnal Audiens*, <https://journalaudiens.umsida.ac.id/index.php/ja/article/view/712/305>.
- Taufiqah et al, f. r. (2026). Kepemimpinan Perempuan di Ranah Lokal: Analisis Kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda di Provinsi Maluku Utara. *Journal of Social and Political Sciences*, <https://jurnal.sinesia.id/index.php/sociale/article/view/759/242>.
- Tsabita, S. S. (2024). Representasi Politik Perempuan dalam Pemilu dan Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkannya. [https://kab-garut.kpu.go.id/public/kab-garut/dmdocument/1761797353\\_9a3d11cbd010ab831754.pdf](https://kab-garut.kpu.go.id/public/kab-garut/dmdocument/1761797353_9a3d11cbd010ab831754.pdf). Retrieved from KPUD Kabupaten Garut.